



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 01 April 2017

Halaman: 2

Pansus Wacanakan Jukir Digaji APBD

YOGYA (MERAPI) - Panitia Khusus Perparkiran DPRD Kota Yogyakarta mewacanakan juru parkir digaji dengan APBD Kota Yogyakarta. Langkah itu untuk mengurangi jukir nakal seperti menaikkan tarif parkir.

"Dalam kerangka meningkatkan pelayanan masyarakat, ada wacana petugas parkir digaji APBD Kota Yogyakarta," kata Ketua Pansus Perparkiran, Antonius Fokki Ardiyanto, Sabtu (31/3).

Wacana itu muncul dari hasil studi Pansus Perparkiran ke Batam yang tengah membahas Raperda Perparkiran. Dia menyampaikan dengan pemberian gaji dari APBD akan mengikat petugas parkir yang nakal. Diakuinya selama ini persoalan tarif parkir yang dipungut tinggi atau *nuthuk* telah mencoreng citra Kota Yogyakarta.

"Dengan digaji APBD, bila ada petugas parkir yang *nuthuk* tarif, bisa segera ditindak tegas yakni dipecat," ujarnya.

Pansus Perparkiran juga mewacanakan model karcis parkir berlangganan dalam setahun untuk mengurangi kebocoran pendapatan retribusi parkir. Dia menyatakan selama ini retribusi dan pajak parkir menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Dia menyebut di Batam dengan model parkir berlangganan itu dapat meningkatkan PAD parkir dari Rp 3,6 miliar di tahun 2016, ditarget menjadi Rp 30 miliar di tahun 2017.

Menurutnya, wacana itu juga mendukung keamanan pelayanan parkir terkait kehilangan kendaraan selama parkir karena penyelenggara parkir bisa bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Hal itu mengacu kepada keputusan Mahkamah Agung kehilangan selama parkir menjadi tanggung jawab 100 persen penyelenggara parkir.

Menanggapi wacana itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudo mengatakan harus melakukan kajian mendalam. Pasalnya untuk menerapkan jukir digaji APBD perlu melihat kemampuan anggaran daerah. Apalagi jumlah jukir di Kota Yogyakarta yang mendapat surat tugas izin ada 900 jukir. "Harus dikaji mendalam dulu dan lihat kemampuan keuangan daerah. Selama ini kalau jukir melanggar, surat tugasnya akan dicabut," kata Wirawan.

Dia menyebut persentase keuntungan parkir lebih banyak ke petugas parkir. Meski demikian selama ini pendapatan daerah dari parkir cukup tinggi. Pada tahun 2016 dari parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir menyumbang PAD mencapai Rp 1,6 miliar di tahun 2016.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005